
**ANALISIS TINGKAT KINERJA ANGGARAN MELALUI LAKIP PADA LINGKUP
SATKER POLDA SULUT TAHUN ANGGARAN 2021 – 2023****Oleh****Mohammad Rizky Yahya****Jurusan Akuntansi, STIE Sulut****Jl. R E Martadinata, Dendengan Luar, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia****Email: mryahya@stiesulut.ac.id****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja anggaran melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada lingkup Satuan Kerja (Satker) Polda Sulawesi Utara (Sulut) untuk Tahun Anggaran 2021–2023. Dengan memanfaatkan laporan LAKIP, penelitian ini mengevaluasi perbandingan kinerja per tahun dari masing-masing Satker. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan variabel independen yang terbagi ke dalam tiga kategori, sehingga dilakukan pengujian menggunakan metode uji beda untuk tiga sampel. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder Satker Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulut. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kinerja anggaran setiap tahunnya. Selain itu, terdapat perbedaan penilaian kinerja di antara Satker setiap tahunnya, yang mengindikasikan variasi dalam pencapaian target anggaran. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas pelaksanaan anggaran dan potensi perbaikan dalam pengelolaan kinerja di lingkup Satker Polda Sulut.

Kata Kunci: Kinerja Anggaran, LAKIP, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Kinerja anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada institusi pemerintah, termasuk satuan kerja (satker) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut). Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

AKIP berfungsi sebagai alat evaluasi yang mencerminkan sejauh mana suatu satker mampu mencapai target kinerja berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Polda Sulut, kinerja anggaran memiliki peran strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian seperti pemeliharaan

keamanan, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, tingkat kinerja anggaran antar-satker di lingkungan Polda Sulut seringkali menunjukkan variasi yang signifikan.

Perbedaan tingkat kinerja anggaran ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perencanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat pemanfaatan teknologi dalam proses manajemen keuangan. Selain itu, kualitas pelaporan kinerja dalam AKIP juga memegang peranan penting karena mencerminkan kesesuaian antara alokasi anggaran dengan pencapaian output maupun outcome yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah, Indrayono, dan Herlisnawati (2020) yang menyatakan bahwa hasil analisis dengan persentase pencapaian

kinerja mendapatkan hasil untuk kinerja anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 94,28% untuk tahun 2019, dan pencapaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi dengan pencapaian kinerja penerbitan KTP diperoleh persentase sebesar 100%, penerbitan akte kelahiran anak diperoleh persentase 102,28%, permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK diperoleh persentase 100% sehingga dikategorikan sangat baik. Londa (2022) menemukan kinerja pencapaian kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat dikategorikan pada kelas/kriteria sangat baik. Wantah, Kalangi, dan Tangkuman (2020) menemukan bahwa dari 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan ada beberapa urusan wajib yang persentase realisasi anggarannya dibawah rata-rata yaitu urusan pendidikan; pekerjaan umum; penataan ruang; otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; urusan pilihan ESDM. Ramadhania dan Novianty (2020) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan implementasi AKIP pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi memiliki akumulasi skor rata-rata sebesar 197,2 dan 205 dengan kriteria baik, serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan AKIP sebesar 77,1%.

Melalui penelitian ini, analisis perbedaan tingkat kinerja anggaran satker di Polda Sulut berdasarkan AKIP menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja satker di lingkungan Polda Sulut. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut [1].

akuntabilitas merupakan sebuah wujud dalam kewajiban penye diaan penyelenggaraan didalam setiap kegiatan or ganisasi sektor publik dalam mendapatkan penjela san dan pertanggungjawaban semua yang ber sangkutan dengan tiap program yang telah diselenggarakan dan untuk semua keputusan dan prosedur yang dilaksanakan serta dengan tanggung jawab dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan [4].

Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi [2].

kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasa ran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di tuangkan melalui perencanaan strategis suatu or ganisasi. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan secara bertanggung ja wab atau sesuai dengan

.....
 tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan [4].

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [1,2].

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menggambarkan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam membuat LAKIP, instansi pemerintah harus dapat secara kuantitatif menentukan besaran kinerja yang dihasilkan, yaitu besaran dalam bentuk angka atau persentase. Penerimaan dari LAKIP dapat digunakan sebagai bahan evaluasi instansi pemerintah terkait selama 1 tahun anggaran. Penyusunan LAKIP didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 tahun 2021 [3].

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Laporan kinerja tahunan yang memuat pertanggungjawaban kinerja suatu lembaga/instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus bertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kerja yang dicapainya [5]

METODE PENELITIAN

Makalah hendaknya memuat tulisan yang berisi 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori 3. Metode Penelitian (bisa meliputi analisa, tahapan penelitian, metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, implementasi), 4. Hasil dan Pembahasan, 5. Kesimpulan dan Saran (future works) yg berisi penelitian lanjut di masa mendatang. Pada setiap paragraph bisa terdiri dari beberapa subparagraph yang dituliskan dengan penomoran angka arab seperti yang ditunjukkan section berikut ini. Jumlah halaman minimum 10 halaman dan maksimum 12 halaman ukuran A4.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki perbedaan Tingkat kinerja satker di polda sulut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan laporan AKIP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Anggaran di Lingkup Satker Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Polda Sulut)

Capaian reformasi birokrasi bisa tercerminkan menurut Sasaran Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang mempunyai nilai bervariasi dengan menggunakan skala baku menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah.

Data capaian Sasaran Kinerja Pemerintah (SAKIP) masing-masing satker selama tiga tahun 2021-2023 ditunjukkan pada tabel 1. Rata rata penilaian AKIP seluruh satker di Polda Sulut pada tahun 2021: B dengan nilai :65,93, pada tahun 2022 : B dengan nilai : 67,93, dan pada tahun 2023 : BB dengan nilai: 70,13.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, 2022 & 2023 Satker Polda Sulut

Nama Satker	2021		2022		2023	
	N	K	N	K	N	K
ITWASDA	71,92	BB	71,92	BB	71,92	BB
ROOPS	67,71	B	69,02	B	70,34	BB
RORENA	73,16	BB	72,91	BB	72,91	BB
ROSDM	70,77	BB	70,77	BB	71,31	BB
ROSARPRAS	66,41	B	69,28	B	69,28	B
BIDPROPAM	70,5	BB	70,26	BB	70,26	BB
BIDHUMAS	68,02	B	70,79	BB	71,54	BB
BIDKUM	63,11	B	70,2	BB	70,2	BB
BID TIK	67,96	B	71,19	BB	71,19	BB
SPRIPIM	67,96	B	69,51	B	70,64	BB
SETUM	67,68	B	68,3	B	68,3	B
YANMA	69,1	B	69,79	B	70,4	BB
SPKT	62,99	B	69,27	B	70,36	BB
DIT INTELKAM	70,73	BB	70,74	B	70,12	BB
DITRESKRIMUM	70,48	BB	65,74	B	65,74	B
DITRESKRIMSUS	70,51	BB	71,32	BB	71,32	BB
DITRESNARKOBA	70,64	BB	70,77	BB	70,77	BB
DITBINMAS	68,18	B	69,32	B	71	BB
DITSABHARA	68,89	B	68,23	B	70,08	BB
DITLANTAS	68,01	B	71,19	BB	71,44	BB
DITPAMOBVIT	69,5	B	69,27	B	69,27	B
DITPOLAIR	68,27	B	68,4	B	70,07	BB
DITTAHTI	60,55	B	69,63	B	70,36	BB
SATBRIMOB	70,73	BB	67,96	B	67,96	B
SPN	69,63	B	65,74	B	65,74	B
BIDKEU	69	B	68,87	B	68,87	B
BIDDOKKES	70,06	BB	65,74	B	65,74	B
RUMKIT TK. III BHAYU	69,33	B	70,18	BB	70,99	BB
POLRESTA MANADO	70,02	BB	70,33	BB	71,89	BB
POLRES MINAHASA	70,16	BB	70,16	BB	70,87	BB
POLRES BITUNG	70,92	BB	72,42	BB	72,42	BB
POLRES KOTAMOBAG	70,43	BB	71,61	BB	71,86	BB
POLRES SANGIHE	70,2	BB	70,2	BB	70,14	BB
POLRES TALAUD	68,65	B	67,81	B	68,84	B
POLRES MINAHASA UTARA	70,87	BB	71,28	BB	71,77	BB
POLRES MINAHASA SELATAN	70,25	BB	70,82	BB	71,28	BB
POLRES TOMOHON	70,28	BB	70,28	BB	70,94	BB
POLRES BOLMONG			69,3	B	69,45	B
POLRES BOLSEL			69,3	B	69,08	B
POLRES BOLMUT			68,31	B	68,08	B
POLRES BOLTIM			68,94	B	68,08	B
POLRES MITRA			68,71	B	68,87	B
POLRES KEPL. SITARO			67,81	B	67,81	B

Sumber: Data Penilaian AKIP Irwasda Polda Sulut Periode tahun 2021-2023.

Uji Statistik Deskriptif

Pengujian dalam penelitian ini dimulai dengan pengujian deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi atau deskripsi atas data yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
T1	37	61	73	69,02	0,407	2,474
T2	43	66	73	69,62	0,249	1,634
T3	43	66	73	69,99	0,262	1,720
Valid N (listwise)	37					

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Test of Homogeneity of Variances

Uji homogenitas ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 25 for windows, setelah dilakukan analisis maka diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
nilai	Based on Mean	1,405	2	120	0,249
	Based on Median	0,976	2	120	0,380
	Based on Median and with adjusted df	0,976	2	89,552	0,381
	Based on trimmed mean	1,204	2	120	0,304

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji homogenitas diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data homogen. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada perbedaan kinerja dari ketiga periode penilaian kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Anova

ANOVA						
nilai		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups		18,995	2	9,497	2,496	0,000
Within Groups		456,555	120	3,805		
Total		475,550	122			

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa pada kolom Sig. diperoleh nilai 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah ada perbedaan yang signifikan rata-rata kinerja berdasarkan ketiga periode penilaian tersebut. Hasil uji ANOVA tersebut menemukan bahwa ternyata terdapat perbedaan kinerja anggaran dari setiap satker pada 3 periode berbeda. Berdasarkan deskriptif penelitian menemukan bahwa capaian kinerja lebih baik pada saat tahun 2023, yang berarti bahwa semakin meningkatkan kinerja keuangan Satker di Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Uji Anova: Post Hoc

Tabel 5. Hasil Uji Anova Post Hoc

Multiple Comparisons							
Dependent Variable:							
(I) tahun			Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Bonferroni	2021	2022	-0,603	0,437	0,512	-1,66	0,46
		2023	-0,973	0,437	0,084	-2,03	0,09
	2022	2021	0,603	0,437	0,512	-0,46	1,66
		2023	-0,370	0,421	1,000	-1,39	0,65
	2023	2021	0,973	0,437	0,084	-0,09	2,03
		2022	0,370	0,421	1,000	-0,65	1,39
Games-Howell	2021	2022	-0,603	0,477	0,421	-1,75	0,54
		2023	-0,973	0,484	0,118	-2,13	0,19
	2022	2021	0,603	0,477	0,421	-0,54	1,75
		2023	-0,370	0,362	0,565	-1,23	0,49
	2023	2021	0,973	0,484	0,118	-0,19	2,13
		2022	0,370	0,362	0,565	-0,49	1,23

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa perbedaan mean Kinerja tahun 2021 dan kinerja tahun 2022 adalah 0,603 (kinerja tahun 2021 lebih kecil sebanyak 0,603 poin dibanding kinerja tahun 2022). Angka tersebut berasal dari mean kinerja tahun 2021 adalah 69,02 dan kinerja tahun 2022 adalah 69,62 sehingga didapatkan -0,603. Perbedaan mean kinerja tahun 2022 dan kinerja tahun 2023 adalah 0,370 (kinerja tahun 2023 lebih besar 0,370 dari kinerja tahun 2022). Angka tersebut berasal dari mean kinerja tahun 2022 adalah 68,62 dan kinerja tahun 2023 adalah 66,99 sehingga didapatkan -0,370. Dari hasil tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Capaian kinerja yang terbaik berada pada kinerja tahun 2023 yaitu pada satker Polres Bitung.

- Capaian kinerja yang terendah berada pada kinerja tahun 2021 yaitu pada satker DITTAHTI.
- Terdapat perbedaan kinerja setiap satker pada saat sebelum dan sesudah efisiensi anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data penilaian AKIP seluruh satuan kerja (satker) di Polda Sulawesi Utara (Sulut) dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat tren peningkatan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah secara keseluruhan. Pada tahun 2021, Polda Sulut memperoleh predikat **B** dengan nilai **65,93**, yang meningkat menjadi **B** dengan nilai **67,93** pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai predikat **BB** dengan nilai **70,13** pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja.

Meskipun terjadi peningkatan nilai AKIP secara keseluruhan, terdapat variasi performa antar-satker setiap tahunnya. Pada tahun 2021, satker dengan nilai AKIP terendah adalah **DITTAHTI**, sedangkan nilai tertinggi dicapai oleh **RORENA**. Pada tahun 2022, nilai AKIP terendah dialami oleh **Polres Bitung**, sementara **DITRESKRIMUM** memperoleh nilai tertinggi. Pada tahun 2023, **SATBRIMOB** dan **DITRESKRIMUM** memiliki nilai AKIP terendah, sementara **RORENA** kembali menjadi satker dengan nilai tertinggi.

Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun secara agregat kinerja Polda Sulut mengalami peningkatan, masih terdapat disparitas kinerja antar-satker yang memerlukan perhatian. Perlu ada analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai antar-satker, serta upaya strategis untuk meningkatkan kinerja satker dengan nilai terendah agar kesenjangan tersebut dapat diminimalkan. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja secara merata di seluruh satker Polda Sulut.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas Satker dengan Nilai Rendah Satker yang secara konsisten memperoleh nilai rendah, seperti DITTAHTI, SATBRIMOB, dan Polres Bitung, memerlukan program penguatan kapasitas berupa pelatihan manajemen kinerja dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab rendahnya nilai, seperti masalah perencanaan atau implementasi program kerja.
2. Pertukaran Praktik Terbaik Satker yang memperoleh nilai tinggi, seperti RORENA dan DITRESKRIMUM, dapat dijadikan model atau mentor bagi satker lain untuk berbagi praktik terbaik dalam manajemen anggaran dan pelaporan kinerja.
3. Pemanfaatan Teknologi Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja anggaran akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi penilaian AKIP di seluruh satker.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala Lakukan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif, terutama pada satker dengan nilai rendah, untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan langkah perbaikan diterapkan secara efektif.
5. Peningkatan Koordinasi Internal Koordinasi antar-satker perlu diperkuat untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran yang lebih efektif serta akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Himber, M, Esterlin Gita. Ilat, Ventje. dan Pinatik, Sherly., 2023, Evaluasi

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol 11, no. 2.
- [2] Widiyanto, Z, R, Akbar. dan Karina, Arni., 2021, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB), *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, vol 7, no. 1.
- [3] Rosnawintang. Armawaddin, Muhammad. Millia, Heppi. Suriadi, La Ode dan Balaka, Yani. Muhammad, 2023, Analisis Dampak Refocusing Terhadap Kinerja Anggaran Pada Lingkup Satker Polda Sultra Tahun Anggaran 2019 – 2021, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, vol 9, no. 1. Hal 31-40.
- [4] Zaghen, Pundy. Michael, Mamentu. dan Mingkid, Elfie., 2022, Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi)*, vol 18, no. 3.
- [5] Rukundin, Juwita, Mega. Saerang, David. dan Pusung, Rudy., 2023, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, vol 8, no. 3. Hal 462- 468.